



LAPORAN KEGIATAN KOMISI VI DPR RI
DALAM MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2022-2023
Tanggal 10 Januari – 13 Maret 2023
(Masa Sidang Mulai Tanggal 10 Januari– 16 Februari 2023
Dan Masa Reses Mulai Tanggal 17 Februari– 13 Maret 2023)
Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI
Tanggal 16 November 2022

Berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 59 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menjelaskan tentang tugas Komisi dalam bidang pembentukan undang-undang (legislasi), anggaran, dan pengawasan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi VI DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 adalah sebagai berikut:

I. FUNGSI LEGISLASI

Terkait dengan fungsi Legislasi, pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 Komisi VI DPR RI telah melaksanakan :

1. Rapat Pimpinan dan Rapat Intern Komisi VI DPR RI pada tanggal 11 Januari 2023 dengan acara Pembahasan Program Kerja Komisi VI DPR RI Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023. Dan Komisi VI DPR RI menyetujui untuk, antara lain :
 1. Komisi VI DPR RI akan meratifikasi Presiden RI telah berkirim surat kepada Ketua DPR RI dengan Nomor : R-38/Pres/08/2022 perihal : Rencana Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah RI dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates*), dan sesuai keputusan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan

tanggal 3 Oktober 2022 bahwa Komisi VI DPR RI akan melanjutkan pembahasan mengenai rencana kemitraan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Arab melalui mekanisme Rancangan Undang-undang atau Peraturan Presiden pada tanggal 2 November 2022.

2. Rapat internal Komisi VI DPR RI menyetujui rancangan jadwal rapat Komisi VI DPR RI pada masa sidang III Tahun Sidang 2022/2023.
3. Rapat internal Komisi VI DPR RI menyetujui pembentukan panja sebagai berikut
 - a. Panja Distribusi Pupuk
 - b. Panja Distribusi Elpiji
 - c. Panja Pangan
 - d. Panja Transisi energi ke listrik
 - e. Panja Penyehatan dan restrukturisasi
4. Rapat internal Komisi VI DPR RI menerima masukan anggota komisi VI DPR RI sebagai berikut:
 - a) Holding Minyak dan Gas : Pertamina & PGN
 - b) Holding Energi : PLN & EMI
 - c) Holding Pertambangan : Inalum, Antam, Bukit Asam, Timah & Freeport
 - d) Holding Perkebunan : PTPN III
 - e) Holding Pupuk : Pupuk Indonesia
 - f) Holding Pangan : RNI, Berdikari, Garam, Perindo, PPI & SHS
 - g) Holding Industri Kesehatan : Bio Farma, KF, Indofarma & Inuki
 - h) Holding Pertahanan : Len, Dahana, Dirgantara, PAL & Pindad
 - i) Holding Survei : BKI, Sucofindo & Surveyor
 - j) Holding Ultra Mikro : BRI, Pegadaian & PNM
 - k) Holding Asuransi : BPUI, Jasindo, Askrindo, Jamkrindo & Jasa Raharja
 - l) Holding Danareksa-PPA : Danareksa & PPA
 - m) Holding Aviata : Aviata, AP I, AP II, HIN, Sarinah & TWCBPRB

II. FUNGSI ANGGARAN

Pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023, Komisi VI DPR RI tidak ada kegiatan yang terkait dengan Anggaran

III. FUNGSI PENGAWASAN

Terkait dengan fungsi pengawasan, pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 Komisi VI DPR RI telah melaksanakan :

A. RAPAT PIMPINAN DAN RAPAT INTERN KOMISI VI DPR RI

Pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023, berdasarkan hasil Keputusan Rapat Pimpinan DPR RI tanggal 17 Juni 2020 tentang Tata Cara Rapat Komisi/AKD pada masa *New Normal*, rapat-rapat di DPR RI dilaksanakan secara fisik dan virtual. Komisi VI DPR RI telah melaksanakan Rapat Intern Komisi VI DPR RI yaitu :

1. Rapat Intern Panja Komoditas Komisi VI DPR RI pada tanggal 16 Januari 2023 pembahasan mengenai penyusunan laporan panja komoditas, dengan kesimpulan antara lain :
 - a) Panja Komoditas Komisi VI DPR RI perlu mengundang lagi narasumber yang kompeten.
 - b) Panja Komoditas Komisi VI DPR RI perlu mengundang pelaku perdagangan komoditas, Asosiasi- asosiasi yang terkait langsung dengan (komoditas tambang, perkebunan, bahan pokok)
 - c) Panja Komoditas Komisi VI DPR RI perlu merancang kembali kerangka berfikir dalam laporan akhir panja.
 - d) Panja Komoditas Komisi VI DPR RI mengusulkan untuk dilakukan kunjungan Spesifik.

2. Rapat Intern Panja Distribusi pupuk Komisi VI DPR RI pada tanggal 16 Januari 2023, pembahasan mengenai penyusunan laporan panja Distribusi pupuk, dengan kesimpulan :
 - a) Panja Distribusi Pupuk Komisi VI DPR RI perlu memanggil Menteri Pertanian terkait RDKK;

- b) Panja Distribusi Pupuk Komisi VI DPR RI perlu mengundang BUMN Pupuk dan Kementerian BUMN;
- c) Panja Distribusi Pupuk Komisi VI DPR RI perlu memanggil PGN terkait pasokan gas;
- d) Panja Distribusi Pupuk Komisi VI DPR RI perlu memanggil BUMN Perbankan (Himbara) yang mengeluarkan Kartu Tani supaya ada kejelasan;
- e) Panja Distribusi Pupuk Komisi VI DPR RI perlu mengadakan Rapat Gabungan (Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Keuangan);
- f) Panja Distribusi Pupuk Komisi VI DPR RI mengusulkan FGD dengan BUMN terkait salah satu anak perusahaan PT. Petrokimia Gresik;
- g) Panja Distribusi Pupuk Komisi VI DPR RI perlu melakukan Kunspek;
- h) Panja Distribusi Pupuk Komisi VI DPR RI mengusulkan agar produksi pupuk organik.

3. Rapat Intern Panja pangan dan barang kebutuhan pokok Komisi VI DPR RI pada tanggal 16 Januari 2023, pembahasan mengenai penyusunan laporan panja pangan, dengan kesimpulan :

Rapat Intern Panja Pangan Komisi VI DPR RI menyetujui untuk menjadwalkan Rapat Gabungan dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Dirjen Niaga Kementerian Perdagangan RI untuk meminta penjelasan untuk mengetahui peran dan fungsi Kementerian Perdagangan setelah terbentuknya Badan Pangan.

4. Rapat Intern Panja Distribusi Elpiji Komisi VI DPR RI pada tanggal 16 Januari 2023, pembahasan mengenai penyusunan laporan panja Distribusi Elpiji, dengan kesimpulan antara lain :

- a) Panja Distribusi Elpiji Komisi VI DPR RI akan mengundang Patra niaga untuk memberikan gambaran pola distribusi dari hulu sampai hilir dan bagaimana regulasinya;

- b) Panja Distribusi Elpiji Komisi VI DPR RI perlu memanggil para pelaku usaha terkait distribusi elpiji;

B. RAPAT KERJA/RDP/RDPU/PANJA KOMISI VI DPR RI

Rapat menyetujui pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023, Komisi VI DPR RI untuk menjadwalkan Rapat Kerja/RDP/RDPU/Panja sebagai berikut :

1. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI pada tanggal 13 Februari 2023, dengan pembahasan Evaluasi kinerja Kementerian BUMN tahun 2022;
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM RI pada tanggal 14 Februari 2023 pembahasan mengenai Progress pembinaan KUKM dan Sinkronisasi basis data KUKM di seluruh Indonesia;
3. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI pada tanggal 6 Februari 2023, pembahasan mengenai evaluasi kinerja kementerian investasi/BKPM tahun 2022;
4. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala BPKN dan menerima audiensi dari masyarakat perkumpulan komunitas konsumen meikarta pada tanggal 18 Januari 2023. Pembahasan mengenai aspirasi dari konsumen pengembang pembangunan meikarta (PT Mahkota Sentosa Utama);
5. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, PT Berdikari, PT Garam, PT Perikanan Indonesia/Perindo, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/PPI, PT Sang Hyang Seri/SHS (Holding Pangan), pada tanggal 24 Januari 2023, pembahasan mengenai Evaluasi Kinerja Korporasi tahun 2022, *Roadmap* Pengembangan Holding BUMN Pangan (FOOD.ID);
6. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Dirut PT Bio Farma (Persero), Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk, Direktur Utama PT IndoFarma Tbk, dan Direktur Utama PT Industri Nuklir Indonesia/INUKI (holding Farmasi) pada tanggal 24 Januari 2023, pembahasan mengenai

- Evaluasi Kinerja Korporasi tahun 2022, Roadmap Pengembangan Holding BUMN Farmasi, dan Inisiatif strategis perusahaan tahun 2023;
7. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI Direktur Utama PT LEN Industri (Persero)/Defend ID, Direktur Utama PT Dahana, Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Direktur Utama PT PAL Indonesia, dan Direktur Utama PT Pindad (Holding Pertahanan) pada tanggal 25 Januari 2023, pembahasan mengenai Evaluasi Kinerja Korporasi tahun 2022, Roadmap Pengembangan Holding BUMN Industri Pertahanan (Defend.ID), dan Inisiatif strategis perusahaan tahun 2023;
 8. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk, Direktur Utama PT Pegadaian dan Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (holding Utra Mikro) pada tanggal 30 Januari 2023, pembahasan mengenai Evaluasi Kinerja Korporasi dan Sektor Ultra Mikro tahun 2022, Evaluasi Pengembangan Segmen Ultra Mikro Nasional, dan Roadmap Pengembangan Sektor Ultra Mikro;
 9. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia, Direktur Utama PT Asuransi Kredit Indonesia, Direktur Utama PT Jaminan Kredit Indonesia, dan Direktur Utama PT Jasa Raharja (Holding Asuransi) pada tanggal 30 Januari 2023, pembahasan mengenai Evaluasi Kinerja Korporasi tahun 2022, Roadmap Pengembangan Holding BUMN Asuransi Tahun 2023, dan Strategi Mitigasi Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Ekonomi Tahun 2023;
 10. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) (Holding Minyak dan Gas) pada tanggal 31 Januari 2023, pembahasan mengenai Evaluasi Kinerja Korporasi tahun 2022, *Roadmap* Pengembangan Jaringan Gas Nasional, dan Inisiatif strategis perusahaan tahun 2023;
 11. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 1 Februari 2023, pembahasan mengenai rencana Semen Indarung I menjadi World Heritage;

12. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT PLN dan EMI (Holding Energi) pada tanggal 15 Februari 2023. Pembahasan mengenai Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Progress dan Roadmap atas akuisisi PT Energy Management Indonesia (EMI);
13. Rapat Dengar Pendapat Panja Transisi Energi ke Listrik Komisi VI DPR RI dengan Dirut PT IBC pada tanggal 15 Februari 2023, dengan Pembahasan mengenai pengembangan ekosistem industri baterai kendaraan bermotor listrik;
14. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan pengrajin tempe pada tanggal 18 Januari 2023, pembahasan mengenai menerima aspirasi dari pengrajin tempe skala menengah dan kecil;
15. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan perwakilan koperasi simpan pinjam sejahtera Bersama pada tanggal 19 Januari 2023, pembahasan mengenai menerima audiensi anggota koperasi simpan pinjam sejahtera Bersama;
16. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan perwakilan badan perusahaan BP Batam pada tanggal 19 Januari 2023, pembahasan mengenai menerima badan perusahaan BP Batam;
17. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan aliansi masyarakat massenrempulu (AMPU) pada tanggal 19 Januari 2023, pembahasan mengenai menerima audiensi aliansi masyarakat massenrempulu terkait pengurusan lahan pertanian dan ternak;
18. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan Presdir PT Mahkota Sentosa Utama pada tanggal 25 Januari 2023, pembahasan mengenai aspirasi dari konsumen pengembang pembangunan apartemen meikarta (PT Mahkota Sentosa Utama);
19. Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Distribusi Elpiji Komisi VI DPR RI dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Hiswana Migas pada tanggal 1 Februari 2023, pembahasan mengenai masukan terhadap hambatan dan kendala dalam distribusi elpiji;
20. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan Presiden Komisaris Lippo Grup, Direktur Utama PT Lippo Cikarang Tbk, dan

Presiden Direktur PT Mahkota Sentosa Utama pada tanggal 13 Februari 2023, pembahasan mengenai Aspirasi dari Konsumen Pengembang Pembangunan Apartemen Meikarta (PT Mahkota Sentosa Utama);

21. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia pada tanggal 11 Februari 2023, dengan pembahasan Menerima audiensi dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO).
22. Rapat Dengar Pendapat Konsinyering Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Perdagangan RI pada tanggal 17 Januari 2023, pembahasan terkait dengan program kerja kementerian perdagangan RI

C. KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK/KUNJUNGAN KERJA RESES/KUNJUNGAN KERJA PENGAWASAN LUAR NEGERI KOMISI VI DPR RI

Pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023, Komisi VI DPR RI telah melaksanakan kunjungan kerja antara lain :

1. Kunjungan Kerja Spesifik ke kota Depok terkait Peninjauan kesiapan LRT jabodetabek stasiun harjamukti depok jawa barat pada tanggal 26-28 Januari 2023.
2. Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Tangerang Selatan terkait peninjauan ke Perum perumnas Tangerang selatan pada tanggal 26-28 Januari 2023.
3. Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Manado Sulawesi Utara terkait peninjauan ke PT PLN Persero pada tanggal 26-28 Januari 2023.
4. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT POS Indonesia Persero Kota Bandung, Jawa Barat pada tanggal 2-4 Februari 2023.
5. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Kereta Api Indonesia Persero, Bandung, Jawa Barat pada tanggal 2-4 Februari 2023.
6. Kunjungan Kerja Spesifik ke PTPN VIII Bandung Jawa Barat pada tanggal 2-4 Februari 2023.
7. Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi DIY pada tanggal 20-24 Februari 2023
8. Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 23-27 Februari 2023.

9. Kunjungan kerja Reses ke Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 23-27 Februari 2023.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Komisi VI DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022 – 2023.

Jakarta, 23 Februari 2023
KABAGSET KOMISI VI DPR RI,

TTD.

DEWI RESMINI, S.E., M.Si
NIP. 19710407 199203 2 001